

## **PARTISIPASI MASYARAKAT DESA LIBA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Suatu Studi di Desa Liba Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa)**

*Windy Lovelia Kumendong<sup>1</sup>*

*Johannis Kaawoan<sup>2</sup>*

*Frangky Rengkung<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Partisipasi politik merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat dalam proses politik, dalam Negara demokrasi rakyat diharapkan dapat ikut berpartisipasi politik secara aktif. Partisipasi aktif masyarakat dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah dengan ikut serta dalam pemilihan pemimpin pemerintahan, termasuk pemilihan kepala desa. Pada saat pemilihan kepala desa Liba tahun 2016, partisipasi politik masyarakat masih kurang. Secara umum kurangnya partisipasi masyarakat tersebut dipengaruhi oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja kepala desa, hal ini disebabkan oleh sikap dan perilakunya yang sering tidak sejalan dengan keinginan masyarakat, sehingga masyarakat menganggap pemerintah desa tidak membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan mereka. Faktor ekonomi juga berpengaruh terhadap keputusan masyarakat desa liba untuk tidak memilih, hal ini disebabkan karena demokrasi yang dilaksanakan selama ini tidak berbanding lurus dengan kemakmuran masyarakat, ketika kran demokrasi dibuka lebar-lebar ternyata tidak membawa dampak yang positif terhadap masyarakat yang terjadi adalah masyarakat lebih memilih untuk bekerja dari pada datang ke TPS untuk memilih. Pemberian suara dalam Pilkades merupakan wujud partisipasi dalam politik, kegiatan ini tidak sekedar hanya pemilih memberikan suaranya namun sebelumnya terdapat rangkaian proses mengapa seorang memutuskan berangkat ke TPS atau tidak. Data yang ada menunjukkan bahwa tingkah laku pemilih desa Liba dipengaruhi oleh faktor ideologis menjadi salah satu alasan. Secara khusus diketahui bahwa teknik pelaksanaan pemilihan membawa pengaruh yang besar terhadap keputusan masyarakat untuk tidak memilih, Nampak bahwa Panitia Pelaksana Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa (P4KD) kurang sigap dalam mengantisipasi keadaan yang terjadi di lapangan. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa Liba dilakukan dengan berbagai cara, terutama P4KD sebagai pengembangan tanggung jawab untuk dapat menyelenggarakan pilkades yang dapat melahirkan pemimpin yang sah dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

**Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pemilihan Kepala Desa.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

## Pendahuluan

Pemilihan kepala desa bagi penduduk desa adalah sebuah wahana penting bagi mereka, karena nasib mereka kedepan ditentukan dari pemimpin yang mereka pilih secara langsung. Oleh karena itu masyarakat desa selalu mengharapkan pemimpin atau kepala desa yang bisa memimpin dengan baik untuk kedepannya, selanjutnya partisipasi politik masyarakat merupakan faktor penting dalam sebuah negara demokrasi. Secara etimologis, partisipasi berasal dari pars yang artinya bagian dan capere, yang artinya mengambil, sehingga diartikan "mengambil bagian". Pemilihan kepala desa merupakan sesuatu hal lazim yang dilaksanakan ditiap-tiap desa, merupakan sesuatu proses rutinitas pergantian pemimpin desa. Kepala desa adalah pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat. Jabatan kepala desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya wali nagari (Sumatera Barat), pambakal (Kalimantan Selatan), hukum tua (Sulawesi Utara).

Fenomena yang terjadi di Desa Liba Kecamatan Tomposo Kabupaten Minahasa partisipasi masyarakat sangatlah tinggi khususnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, hampir disetiap rumah anggota keluarga memperbincangkan siapa saja calon yang sangat layak untuk dipilih, yang dinilai dari berbagai aspek mulai dari yang terkaya, terpintar, terkenal, banyak memberikan sumbangan atau bantuan, dan lain sebagainya. Fenomena ini

lazimnya terjadi hampir disetiap desa yang ada di minahasa, peristiwa pemilihan kepala desa dapat dijadikan suatu momen untuk saling memuji bahkan menghujat salah satu pasangan calon, masyarakatpun terlibat aktif memainkan issue ini. dengan demikian partisipasi masyarakat dapat dikatakan aktif, karena masyarakat turut terlibat memberikan pendapat, opini, ide-ide pemikiran baik yang sifatnya positif maupun negatif. Namun sangat disayangkan apabila partisipasi politik masyarakat menjelang pemilihan kepala desa lebih kepada hal-hal yang sifatnya provokasi dan black campaign terhadap salah satu calon tertentu, hal ini tidak mencerminkan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Aktor-aktor yang bermain untuk memainkan isu tertentu yang biasanya dari pendukung salah satu calon atau biasa yang disebut sebagai tim sukses tidak memberikan contoh etika berdemokrasi yang baik.

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan hukum tua di desa Liba, biasanya adalah partisipasi yang pasif, dimana masyarakat akan berpartisipasi apabila telah dijanjikan atau telah menerima sesuatu materi tertentu seperti misalnya bahan kebutuhan pokok, materi (uang) dan lain sebagainya. Sedangkan partisipasi untuk memberikan bantuan materi guna suksesnya pemilihan kepala desa dirasa masih sangat minim. Hal ini seperti yang terjadi pada pemilihan kepala desa tahun 2016 yang lalu, dimana partisipasi masyarakat sangatlah kental dengan pragmatis transaksional, yaitu masyarakat akan berpartisipasi apabila sudah mendapat jaminan materi dari salah satu calon kepala desa. namun disisi lain sebagai masyarakat seperti yang peneliti peroleh informasi dari salah satu masyarakat saat melakukan

observasi awal diperoleh informasi bahwa masyarakat akan sangat bersyukur apabila dari calon kepala desa menyediakan bantuan kepada masyarakat, misalnya setiap malam dirumah calon kepala desa menyediakan makan malam (open house) tersedia bagi masyarakat yang akan datang disajikan makanan dan minuman gratis, biasanya hal ini akan berlangsung selama satu bulan sebelum hari pemilihan, masyarakat juga menilai bahwa hal tersebut adalah wajar mengingat waktu yang dikorbankan untuk melaksanakan aktivitas mata pencaharian terganggu karena proses pemilihan kepala desa ini, sehingga kompensasi memberikan makan dan minum gratis kepada masyarakat pendukung dianggap wajar.

## Tinjauan Pustaka

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "participation" yang berarti pengambilan bagian, pengikut sertaan Pius A. Partan dan M. Dahlan Al-Barry, (2006:55). Slamet (2005:7) mengatakan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran atau langsung dalam bentuk fisik. Masyarakat dalam berpartisipasi dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Adapun Robert Chambers (2005:105) menyebutkan ada 3 model partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli, seperti menurut Arnstein yang mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat terdapat 8 tingkatan, berbeda dengan Kenji dan Greenwood justru dalam membagi jenjang

partisipasi dipersempit menjadi 5 tingkatan. Sedangkan Vene Klases dengan Miller membagi jenjang partisipasi berjumlah 7 tingkatan. Dari beberapa pendapat para teoritis, pada intinya goal yang diinginkan dari partisipasi masyarakat yaitu munculnya kemandirian masyarakat dalam mengontrol atau memobilisasi diri. Jenjang partisipasi masyarakat dapat direncanakan sesuai dengan konteks dan kebutuhan tertentu. Dari ketiga model partisipasi masyarakat tidak ada klaim yang menegaskan sebagai satu-satunya jenjang yang paling benar dan yang paling otoritatif Robert Chambers, (2005:106). Definisi dari "partisipasi" masyarakat adalah sebuah bentuk pemaknaan tentang praktek yang baik. Individu atau kelompok dapat diikutsertakan untuk membangun partisipasi mereka sendiri. Jenjang partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa kata "partisipasi" dapat digunakan untuk aktivitas dan hubungan yang berbeda. Jenjang partisipasi masyarakat juga dapat menunjukkan bahwa masing-masing model partisipasi merupakan semuanya berbicara tentang kekuasaan. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan dan memperbaiki kebiasaan masyarakat untuk lebih baik. Menurut pernyataan Sherry R Arnstein yang dikutip oleh Sigit (2013:27), bahwa membagi jenjang partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam 8 tingkat partisipasi masyarakat dengan berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat. 6 Tingkat partisipasi dari tertinggi ke terendah adalah sebagai berikut:

a. Citizen control, masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan mengendalikan seluruh proses

- pengambilan keputusan. Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingannya. Masyarakat mempunyai wewenang dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Usaha bersama warga ini langsung berhubungan dengan sumber dana untuk memperoleh bantuan tanpa melalui pihak ketiga.
- b. *Delegated power*, pada tingkatan ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana tertentu. Untuk menyelesaikan permasalahan, pemerintah harus mengadakan negosiasi dengan masyarakat tidak dengan tekanan dari atas, dimungkinkan masyarakat mempunyai tingkat kendali atas keputusan pemerintah.
- c. *Partnership*, masyarakat berhak berunding dengan pengambil keputusan atau pemerintah, atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu, diambil kesepakatan saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah yang dihadapi.
- d. *Placation*, pemegang kekuasaan (pemerintah) perlu menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan publik, di mana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan. Walaupun dalam pelaksanaannya usulan masyarakat tetap diperhatikan, karena kedudukan relatif rendah dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan anggota dari pemerintah maka tidak mampu mengambil keputusan.
- e. *Consultation*, masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Metode yang sering digunakan adalah survei tentang arah pikiran masyarakat atau pertemuan lingkungan masyarakat dan *public hearing* atau dengar pendapat dengan masyarakat.
- f. *Informing*, pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan, tetapi tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Informasi diberikan pada tahapan akhir perencanaan dan masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana yang telah disusun.
- g. *Therapy*, pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih pada mengubah pola pikir masyarakat dari pada mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri.
- h. *Manipulation*, merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah, di mana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Kegiatan untuk melakukan manipulasi informasi untuk memperoleh dukungan publik dan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun tidak akan pernah terjadi.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah Surbakti, (2005:169). Martin Harrop dan William Miller berpendapat bahwa pendekatan perilaku pemilih dalam ilmu politik terbagi ke dalam tiga garis besar pendekatan/model. Pertama, pendekatan yang sangat psikologis yang disebut identifikasi partai (*party identification*). Kedua, pendekatan yang menganggap individu memiliki kapasitas rasional untuk menentukan pilihan-pilihannya (*rational choice*). Pemilih dianggap memahami, mengapa ia memilih, apa dampak dari pilihannya itu dan ia sadar betul pilihan yang diambil adalah instrumen penting bagi artikulasi kepentingan politiknya. Lalu pendekatan yang ketiga, adalah pendekatan secara sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan ini melihat pentingnya basis sosial dalam menentukan perilaku memilih. Misalkan, identitas sosial seperti agama, kelas sosial, dan suku bangsa menjadi alasan utama seseorang memilih sebuah partai atau seorang kandidat. Budi Suryadi, (2007:146).

Partisipasi politik yang dimaksud adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak perencanaan, pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Peran warga dalam partisipasi politik tersebut, selama ini bisa dikatakan masih sangat kurang Sunardjo Unang, (2005:90-91).

Partisipasi masyarakat merupakan keharusan dalam

mewujudkan pemerintahan yang demokratis, oleh karena itu pertanyaannya adalah bagaimana agar partisipasi masyarakat ini bisa muncul? Tentu saja jawabannya tidak semudah membalikan telapak tangan, namun harus tetap ada upaya yang harus di usahakan menuju partisipasi tersebut. Terkadang keinginan untuk berpartisipasi dari masyarakat sangat besar, tetapi untuk mengaktualisasikan partisipasi tersebut kerap tidak tahu bagaimana caranya, jika hal tersebut dibiarkan maka kemungkinan yang timbul adalah kekerasan sebagai bentuknya, karena partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah berarti masyarakat bekerja sebagai partner (*mitra*) pemerintah dan mereka berpartisipasi dengan berbagai cara dalam mempromosikan hak asasi manusia dan barang-barang

Kepala desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban. Di samping itu kepala desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan Unang Sunardjo,(2005:197).

Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa, hal ini telah berlangsung dari jaman penjajahan belanda hingga sekarang. Model pemilihan kepala desa yang paling sederhana pada jaman penjajahan belanda adalah dengan cara masing-masing pemilih dan pendukung calon kepala desa membuat barisan adu panjang ditanah lapangan, sehingga

memunculkan pendukung inti yang namanya GAPIT /nama lainnya, yang pada saat ini dikenal dengan tim sukses masing-masing kandidat kepala desa. Calon kepala desa terpilih adalah yang barisan pemilih/pendukungnya paling panjang. Model pemilihan seperti ini rawan sekali adanya konflik horizontal secara terbuka antara pendukung calon yang satu dengan calon lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya untuk mencegah adanya konflik terbuka antar pendukung maka model pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan pemilihan langsung secara tertutup.

Pemungutan suara dilaksanakan dengan menggunakan lidi (bahasa jawa = biting) yang diberi tanda khusus oleh panitia kemudian dimasukkan di dalam "bumbung" yang diletakkan di dalam bilik tertutup. Bumbung adalah sepotong batang bambu yang dilubangi untuk memasukkan lidi. Jumlah "bumbung" disesuaikan dengan jumlah calon yang ada. Masing-masing bumbung ditandai dengan simbol berupa hasil bumi atau palawija. Misalnya calon kepala desa si "A" menggunakan simbol "Jagung", calon si "B" menggunakan simbol "Padi" dan seterusnya. Setiap pemilih yang menggunakan hak pilihnya menerima satu "biting"/lidi dan dibawa masuk ke dalam bilik tertutup. Di dalam bilik pemilih tadi memasukkan lidi kedalam "bumbung" sesuai pilihannya, misalnya memilih si A maka pemilih akan memasukkan lidi kedalam "bumbung" bergambar jagung. Hasil pemungutan suara dihitung berdasarkan jumlah lidi pada masing-masing "bumbung" tadi. Jika terdapat calon tunggal maka ada 2 bumbung di dalam bilik pemungutan suara yaitu bumbung dengan simbol calon kepala desa yang ada dan satu

bumbung lagi tanpa simbol apapun yang disebut "bumbung kosong".

Jika hasil penghitungan lidi dari bumbung kosong jumlahnya lebih banyak berarti calon tunggal tadi kalah dengan bumbung kosong dan dia dinyatakan tidak terpilih. Periode berikutnya setelah indonesia merdeka pemilihan kepala desa sudah mengalami peningkatan yaitu dengan menggunakan pemilihan tertutup dalam bilik suara dengan menggunakan kartu suara. Karena pada saat itu belum banyak orang yang bisa membaca alias masih banyak orang yang buta huruf maka kartu suara tidak bertuliskan nama tetapi menggunakan gambar hasil bumi atau palawija. Sama seperti pada model sebelumnya gambar yang digunakan adalah gambar hasil bumi/palawija. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya menerima satu lembar kartu suara kemudian membawanya kedalam bilik tertutup dan mencoblos gambar salah satu calon yang dikehendaknya. Hasil penghitungan suara, calon yang mendapat suara terbanyak itulah yang terpilih sebagai kepala desa.

Di era reformasi sekarang ini, model pemilihan kepala desa mengalami perkembangan yaitu menggunakan kartu suara berisi foto dan nama calon. Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya harus mencoblos gambar/foto calon yang dipilihnya. Hasil penghitungan suara masih sama dengan cara sebelumnya yaitu calon yang memperoleh suara terbanyak itulah pemenangnya Ramlan Subakti, (2005:56).

## Metode Penelitian

Pada setiap penelitian memerlukan jenis penelitian yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti, agar data yang diperoleh

menjadi selaras dengan permasalahan sehingga mempermudah pelaksanaan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang ingin mendapat gambaran secara utuh rendahnya partisipasi pemilih pada pemilihan kepala desa Moleong (2008:9).

Berdasarkan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka fokus penelitian ini adalah: partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa yang dikaji dari aspek-aspek partisipasi masyarakat menurut Nelson (2005:323-324) yang menyebutkan adanya dua macam bentuk partisipasi, yaitu :

1. Partisipasi horizontal, yaitu partisipasi diantara sesama warga atau anggota masyarakat, dimana masyarakat mempunyai kemampuan berprakarsa dalam menyelesaikan secara bersama suatu kegiatan pembangunan.
2. Partisipasi vertikal, yaitu partisipasi antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai pengikut atau klien.

Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara pada informan, yaitu:

- a. Masyarakat
- b. Panitia Pemilihan
- c. Kepala Desa / Hukum Tua terpilih
- d. BPD

## Hasil Penelitian

Merujuk pada hasil penelitian untuk mengukur ciri-ciri kepribadian informan, dapat menentukan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa, fakta yang ada menggambarkan bahwa ada ciri-ciri tidak toleran, otoriter, dan acuh tak acuh terhadap penyelenggaraan Pilkades. Ini berarti

sesuai dengan temuan-temuan beberapa ahli, yang menggambarkan para nonvoter umumnya berkepribadian tidak toleran dan otoriter. Hal yang menarik adalah bahwa alasan mereka untuk tidak aktif dalam Pilkades di Desa Liba pada umumnya bahwa sudah ada lembaga yang mengurus masalah Pilkades ini, ada juga alasan bahwa masalah Pilkades di Desa Liba ini menjadi tanggung jawab, seluruh warga masyarakat. Artinya ketika informan tidak terlibat secara aktif dalam pemilihan kepala desa, informan beranggapan ada bagian masyarakat lain yang sudah mengurus kegiatan tersebut, dan menganggap sudah tanggung jawabnya.

Di sisi lain, ada nonvoter yang diteliti menunjukkan sikap sangat tidak toleran, hal ini dibuktikan dengan sikap informan yang acuh tak acuh terhadap Pilkades karena alasan mereka tidak memilih adalah merasa belum "merdeka". Artinya secara ekonomi mereka belum terbebas dari kemiskinan walaupun telah ada pergantian kepala desa. Menurut pendapat informan perubahan pemimpin tidak membawa perubahan yang berarti terhadap kehidupan mereka (tidak berbanding lurus). Hal ini secara langsung membentuk ciri-ciri kepribadian mereka acuh tak acuh. Hal ini didukung dari temuan fakta bahwa pemerintahan desa tidak membawa pengaruh besar bagi kehidupan informan, peran pemerintahan desa hanya sebatas peran administratif, dimana pada saat pembuatan KTP, KK maupun jual beli tanah.

Perilaku tidak memilih bukanlah tanpa tujuan. Perilaku tidak memilih sebenarnya dimaksudkan sebagai simbol atas berbagai bentuk protes politik yang tidak tersuarakan. Perilaku

tidak memilih bagi para pelakunya bisa merefleksi berbagai pesan. Catatan penting yang perlu diungkap lebih jauh bahwa ternyata perilaku tidak memilih di desa Liba tidak disebabkan anggapan bahwa sistem pemilihan kepala desa yang tidak demokratis. Pemahaman informan tentang sistem pemilihan kepala desa yang demokratis adalah masyarakat ikut dilibatkan dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Sejak dari pembentukan P4KD, pencalonan kepala desa, penyusunan daftar pemilih, sosialisasi, kampanye, hingga hari pemungutan suara, dan penetapan calon kepala desa terpilih.

Beberapa sumber menyatakan bahwa ada kesalahan teknik pada panitia, dimana pada awal pemungutan suara, pemilih yang datang setelah mendaftarkan diri dipersilahkan untuk menunggu dan setelah dipanggil baru diberi kartu suara untuk kemudian menuju bilik suara dan seterusnya. Beberapa nara sumber berpendapat bahwa prosedur pemanggilan ini yang kemudian menjadikan penumpukan pemilih hingga kemudian pemilih harus menunggu lama untuk memberikan suaranya di bilik suara. Banyaknya pemilih yang harus antri menunggu ini kemudian membuat pemilih yang baru datang malas memberikan suara dan memutuskan untuk pulang.

Konteks semacam ini perilaku nonvoting merupakan bentuk protes dari ketidakpercayaan orang terhadap sistem politik yang sedang berjalan, namun perilaku nonvoting secara teoritis seringkali juga dipahami sebagai bentuk kepercayaan politik, artinya ketidakhadiran seseorang dalam pemilihan kepala desa (pilkades) merupakan refleksi dari kepercayaan terhadap sistem politik yang

ada. Analisis terhadap pemilihan kepala desa Liba, ditemukan fakta bahwa pemilih merasa kecewa karena kepala desa yang saat ini memimpin tidak mampu memenuhi harapan masyarakat Desa Liba, hal ini membuat pemimpin terpilih dianggap tidak berkinerja bagus. Kekecewaan pemilih ini menjadi penting untuk dianalisis karena beberapa hal. Pertama identifikasi kekecewaan pemilih menjadi pemicu untuk memilih dimasa yang akan datang. Kedua kekecewaan di masa lalu ternyata berdampak pada ketidakpercayaan pemilih terhadap pemimpin desa Liba di masa yang akan datang. Kebanyakan informan membandingkan figur kepala desa incumbent dengan ini dianggap mempunyai kinerja yang lebih baik, peduli terhadap masyarakatnya, jujur, dan religius, sehingga dapat dikatakan bahwa ada krisis kepemimpinan yang dirasakan oleh informan.

Faktor ekonomi bisa jadi merupakan penentu utama mengapa seseorang tidak memilih, hal ini terjadi ketika demokrasi yang dilaksanakan selama ini tidak berbanding lurus dengan kemakmuran masyarakat, ketika kran demokrasi dibuka lebar-lebar ternyata tidak membawa dampak yang positif terhadap masyarakat yang terjadi adalah masyarakat lebih memilih untuk bekerja daripada datang ke TPS untuk memilih. Terjadinya pergeseran kultur masyarakat desa yang dulunya paternalistik, dan tergantung pada pemimpinnya sekarang sudah tidak lagi menempatkan pemimpin sebagai sesuatu yang paling penting, artinya mencari uang adalah sesuatu yang lebih penting, ada proses pergeseran dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang materialistik yang tengah terjadi pada masyarakat desa Liba.

Pemberian suara dalam Pemilu merupakan wujud partisipasi dalam politik, kegiatan ini tidak sekedar hanya memilih memberikan suaranya namun sebelumnya terdapat rangkaian proses mengapa seseorang memutuskan untuk berangkat ke TPS atau tidak. Kasus Pilkades di Liba ini partisipasi yang terjadi lebih banyak mengarah pada pola partisipasi yang dimobilisasi. Data yang ada menunjukkan bahwa tingkah laku pemilih dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal, kasus di desa Liba ini pemilih yang tidak memilih berdasarkan alasan atas pengalaman hidup mereka. Dari wawancara yang dilaksanakan informan merasa kecewa terhadap kepala desa lama yang tidak mampu memenuhi harapan masyarakat Liba. Hal ini membuat pemimpin terpilih dianggap tidak berkinerja bagus. Kekecewaan pemilih ini menjadi penting untuk dianalisis karena beberapa hal. Pertama identifikasi kekecewaan pemilih menjadi pemicu untuk memilih dimasa yang akan datang. Kedua, kekecewaan di masa lalu ternyata berdampak pada ketidakpercayaan pemilih terhadap pemimpin desa Liba di masa yang akan datang.

Partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala desa di Desa Liba, sesuai dengan hasil wawancara dengan para informan, tidak dapat dipungkiri terjadi karena adanya dorongan politik uang yang diberikan oleh para calon kepala desa. Visi, misi, kapabilitas dari calon kepala desa hanya dijadikan masyarakat sebagai bahan pertimbangan belaka. Jumlah uang yang mereka terima dari calon kepala desa yang akan menentukan pilihan mereka. Masalah ini terjadi akibat dari budaya politik uang yang ada didalam pemilihan kepala desa. Masih rendahnya

pendidikan politik yang masyarakat juga menjadikan politik uang ini meraja lela. Masyarakat menganggap dalam pemilihan kepala desa adalah ajang untuk mendapatkan uang tambahan. Masyarakat juga masih beranggapan bahwa siapapun pemimpinnya tidak akan berimbas apapun kepada mereka secara pribadi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil adalah: Pada saat kampanye ini masyarakat desa Liba cenderung aktif didalamnya. Hal ini tidak luput dari adanya uang pengganti yang mereka dapatkan dari calon kepala desa yang mereka dukung. Motivasi dalam memberikan suara masyarakat desa Liba hanya sebatas sebagai bentuk partisipasi saja. Mereka cenderung kurang memikirkan pemerintahan desa seperti apa yang akan mereka hadapi ketika mereka salah dalam memilih kepala desa. Karena menurut mereka kurang penting siapa yang akan memimpin mereka, karena hal itu dinilai tidak akan berpengaruh dalam kehidupan pribadi mereka. Yang terpenting di sini mereka memberikan suara dan mendapatkan uang dari calon yang mereka pilih.

Bentuk politik uang dalam pemilihan kepala desa Liba dalam bentuk uang yang merupakan suatu bentuk yang lazim. Dilihat dari jumlah nominal dari masa kampanye hingga saat hari pemilihan tiba sangat bervariasi. Nominal yang beredar cukup tinggi mulai dari Rp.150.000,- hingga Rp. 300.000,-. Politik uang yang masih menjadi budaya dalam pemilihan kepala desa Liba menjadi salah satu faktor tingginya minat masyarakat dalam memberikan hak suaranya. Hal itu menjadikan partisipasi masyarakat sangat tinggi, siapa yang memberikan

uang yang paling banyak maka itulah yang akan dipilih oleh masyarakat.

Pemilih di Desa Liba dapat dikategorikan sebagai pemilih yang rasional. Karena pemilih yang menghitung untung dan rugi dari tindakan yang dilakukannya. Menguntungkan bila dianggap ongkos yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil dari tindakan tersebut lebih rendah dari hasil itu sendiri. Sedangkan dianggap rugi apabila ongkos untuk mendapatkan hasil itu lebih tinggi nilainya dari hasil yang diperolehnya.

## Kesimpulan

1. Partisipasi masyarakat bersikap memilih dengan cara menghadiri bilik suara atau TPS pada waktu yang telah ditentukan (jadwal pencoblosan), namun demikian faktor mengapa pemilih menjatuhkan pilihannya kepada salah satu kandidat kades, bukan semata karena pengaruh visi dan misi yang diusung kandidat, namun bukan semata karena pengalaman dan ketokohan (kapasitas kepemimpinan yang dimiliki), akan tetapi juga dipengaruhi oleh besar kecilnya politik uang yang diterima masyarakat sebagai pemilih, dibandingkan dengan besar kecilnya politik uang yang diberikan kandidat lainnya kepadanya.
2. Masyarakat menjatuhkan pilihannya berdasarkan faktor ideologis menjadi salah satu alasan, dari hasil penelitian diketahui ternyata masyarakat menjadikan agama (denominasi/aliran) sebagai faktor terpenting yang harus dipertimbangkan. Karena masih ada kepercayaan masyarakat yang mengatakan bahwa “jika masih ada

yang seagama kenapa harus memilih yang lain”, pendapat ini yang masih digunakan para masyarakat. Sehingga faktor agama dapat mempengaruhi pilihan masyarakat desa Liba.

3. Aspek lingkungan sosial politik juga mempengaruhi pilihan masyarakat. Faktor ini dapat dilihat dengan pendekatan sosiologis dimana seorang anak lebih memilih ikut pemilihan kepala desa dengan pilihan orang tuanya dibandingkan harus memikirkan pilihannya sendiri.
4. Angka golput masih tergolong tinggi, alasan terbesar masyarakat desa Liba yang mengambil sikap golput antara lain adalah karena kurang yakin terhadap pemerintah, tidak yakin para calon akan memenuhi janji-janji mereka, merasa kurang cocok dengan calon yang berkompetisi, tidak memiliki visi misi yang jelas.

## Saran

1. Pendidikan politik yang diterima oleh masyarakat saat ini masih kurang, terutama bagi mereka yang termasuk dalam tingkat ekonomi menengah kebawah. Oleh sebab itu pemberian pendidikan politik semenjak usia dini sudah sangat mendesak. Hal ini ditujukan guna membentuk masyarakat yang akan datang agar tidak berpikir selalu pragmatis. Pendidikan politik sejak usia dini juga ditujukan untuk membentuk generasi penerus yang cerdas dalam berpolitik.
2. Diperlukan keikutsertaan seluruh komponen masyarakat desa Liba, adanya sanksi yang tegas bagi kepala desa yang menyalahgunakan kekuasaan, hal ini sekaligus untuk menjaga agar kepala desa melaksanakan tugasnya dengan baik,

sehingga dapat menjadi pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat desa Liba. Karena partisipasi sebenarnya sekaligus merupakan alat kontrol bagi pemimpin agar tidak menyelewengkan kewenangan yang diberikan kepadanya, karena partisipasi akan menjamin akuntabilitas pemimpin.

3. Perlu adanya pemahaman orang tua untuk memberikan keleluasaan kepada anak-anak mereka yang sifatnya mendidik bukan mendikte, sehingga generasi muda desa liba dapat memahami dengan benar pelaksanaan pemilihan kepala desa untuk kemajuan desa kedepannya.
4. Calon Kepala Desa sebaiknya lebih bermasyarakat sehingga calon pemilih lebih mengenal para calon yang akan dipilihnya dan melakukan sosialisasi dengan baik dan mudah di mengerti oleh masyarakat umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, R. 2005. *Ideas For Development*, Earthscan. London.
- Geertz, C. 2005. Abangan, Santri, dan Priyayi, dalam Masyarakat Jawa, Terjemahan Mahasin Aswab. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Harop, M. dan Miller, M. 2005. *Election and Voters A Comparative Introduction*, Macmillan Education. London.
- Kanji, N. dan Greenwood, L, 2006. *Participatory approaches to Research and Development in IIED: Learning from Experience*. IIED bookshop. London.
- Lidle, W. dan Mujani, S, 2012. *Leadership, Party and Religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia*. Coparative Political Studies.
- Moleong, L. J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Cetakan Kedua.
- Nelson (Tangkilisan), 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Partan, P. A. dan Al-Barry, M. D. 2006. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola
- Sirajuddin. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press
- Slamet, 2005. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University
- Subakti, R. 2005. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Sunardjo, U. 2005. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung: Tarsito
- Suyanto, 2008. *Metode Penelitian Sosial berbagai alternative pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Suryadi, B. 2007. *Sosiologi Politik, Sejarah, Definisi, dan Perkembangan Konsep*, IRCiSoD. Jogjakarta.
- Sutardjo, K, 2007. *Menyoal (akembali) Otonomi Desa*. Jogjakarta.
- Tangkilisan, H. N. S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Wijaksono, S. 2013. *Pengaruh Lama Tinggal Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Pemukiman*. Jurnal ComTech.4(1).
- Widjaja, H. A. 2007. *Otonomi Daerah/Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*. Jakarta: Era Swasta.
- Zakaria, Y. 2005. *Pemulihan Kehidupan Desa dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Dalam Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*, LP3S. Jakarta.

Sumber- sumber lainnya:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Bupati Minahasa Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Hukum Tua.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- Buku Profil Desa Liba Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa
- Kamus Besar Bahasa Indonesia

